



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF PATARANI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 859872

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.270.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 612 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 436 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 302 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
6. Tanah Seluas 311 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 29.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT FI Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT FI-CW Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.268.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

1.320.268.000

III. HUTANG

Rp.

268.413.218

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.051.854.782

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.